

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tengah hidup di era globalisasi dan industri berbasis digital. Globalisasi membawa hubungan antar manusia termasuk antara manusia dan kebutuhannya yang menjadi semakin dekat dan mudah didapat (Rosana, 2010). Pada sektor akuntansi pun dituntut untuk melakukan pembenahan dengan membuat standar akuntansi yang seragam dan secara prinsip dapat digunakan oleh semua pihak dalam rangka menghasilkan informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif penunjang laporan keuangan yaitu *comparability*, *verifiability*, *timeliness*, dan *understandability* (Biswan & Mahrus, 2020). Industri berbasis digital selalu mensyaratkan kinerja dan kualitas teknologi yang senantiasa mengikuti *trend* perkembangan zaman sesuai kebutuhan pengguna. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan data menjadi salah satu kunci keberhasilan menguasai suatu segmen, kelompok, dan siklus bisnis tertentu sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 2015. *Big data*, *data analytics*, *business intelligence* di satu sisi menjadi *opportunity* dan di sisi lain menjadi *threat* bagi keberlangsungan dan kemampuan bertahan suatu entitas untuk memenuhi asumsi *going concern* (Mahrus, 2022). Sama halnya dengan data, informasi juga menjadi suatu hal yang selalu dikejar di era sekarang ini. Siapa yang menguasai data, maka dia menguasai dunia. Sejalan dengan pernyataan Menkominfo, Johnny Gerard Plate (2020), bahwa siapa yang

menguasai data suatu negara, dia yang menguasai negara tersebut. Alvin Toffler, seorang penulis dan futurolog, dalam bukunya berjudul *The Third Wave* (1980) mengatakan bahwa siapa orang yang menguasai informasi, maka akan menguasai dunia (Sanjaya, 2022).

Pemerintah sebagai aktor utama dalam pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan negara dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa berbagai fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu suatu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Menurut UU Keuangan Negara tersebut, salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI mengamanatkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah penggunaan sistem aplikasi keuangan yang mengintegrasikan siklus pengelolaan keuangan negara melalui Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Kehadiran SAKTI bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut diharapkan dapat mengatasi anomali data seperti perbedaan data pelaporan Barang Milik Negara (BMN) antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021.

Piloting SAKTI telah dilakukan sejak 2015 yang dibagi menjadi tiga tahap melalui PMK No. 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dua kali dengan PMK No. 131/PMK.05/2016 dan PMK No. 185/PMK.05/2017. Tahap I minimal lima satuan kerja (Satker) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi DKI Jakarta. Tahap II untuk Satker DJPb di seluruh Indonesia. Tahap III untuk seluruh Satker Kemenkeu. PMK tersebut kemudian dicabut dengan PMK No. 159/PMK.05/2018 yang mengamanatkan *piloting* SAKTI dilakukan pada seluruh Satker Kemenkeu dan beberapa Satker Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan batas waktu maksimal Desember 2018. Tahapan *piloting* SAKTI dilanjutkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 957/KMK.05/2019 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap IV dan KMK No. 537/KMK.05/2019 tentang Pelaksanaan *Piloting* SAKTI Tahap V. Pada mulanya, SAKTI masih *desktop-*

based hingga mulai 2019 sampai dengan 2020 secara bertahap bertransformasi menjadi *web-based* dengan sebutan SAKTI *web full module* (Satriyawan, 2020). PMK No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menginstruksikan bahwa *roll out* SAKTI dilaksanakan mulai tahun anggaran 2022.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan *trusted advisor* pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan BPKP No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020–2024. Dalam rangka menyelenggarakan *good governance* sektor publik, BPKP telah menjadi pembina APIP dalam penerapan *internal control* dan *risk management* pada lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Susanto, 2020). Pembinaan yang dilakukan BPKP bertujuan agar pembangunan nasional dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi dengan kualitas SPIP yang memadai seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sumitro (2016) menyampaikan dalam acara pembukaan *Workshop* Penyusunan Kertas Kerja Audit, Simpulan/Temuan Hasil Pengawasan, dan Laporan Hasil Pengawasan bahwa kualitas output BPKP sebagai pembina APIP harus selalu terdepan (BPKP, 2016). Oleh sebab itu, BPKP sebagai pembina APIP sudah semestinya menjadi cerminan dalam pelaksanaan *roll out* SAKTI yang diharapkan menjadi wujud transformasi sistem pengelolaan keuangan negara

khususnya pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Migrasi data pada aplikasi *existing* seperti Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi anomali data pelaporan keuangan lagi sebagaimana yang menjadi temuan pemeriksaan dalam LHP BPK atas LKPP 2021.

Pelaksanaan tahun pertama *roll out* SAKTI di BPKP merupakan suatu hal baru (kecuali modul penganggaran) yang tentunya akan mengubah kebiasaan pengguna SAKTI yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi *existing* selama bertahun-tahun. Hadi (2022) menerangkan jika perubahan kebiasaan ini memerlukan evaluasi untuk memperoleh saran dan masukan guna tujuan perbaikan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi SAKTI dalam proses pengelolaan keuangan di BPKP.

Penelitian tentang evaluasi SAKTI sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Prabowo (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan SAKTI oleh para pengguna dari 11 Satker di lingkungan Kanwil DJPb DKI Jakarta. Dengan metode kuantitatif menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM), diperoleh hasil bahwa faktor kemanfaatan dan kemudahan penggunaan dinilai layak bagi pengguna. Pambudi dan Adam (2018) yang menganalisis tentang dimensi kesuksesan implementasi SAKTI pada Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Timur juga menghasilkan hal yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada model penelitian yang digunakan yaitu dengan metode kuantitatif

memanfaatkan model DeLone dan McLean. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Amriani dan Iskandar (2019) dalam penelitiannya tentang kesuksesan implementasi SAKTI pada Satker di lingkungan BPPK dengan metode kuantitatif menggunakan lima variabel pengukuran DeLone dan McLean memperoleh hasil bahwa implementasi SAKTI tersebut belum bisa dikatakan sukses. Sihotang (2020) melakukan penelitian kepuasan pengguna SAKTI pada KPPN yang ada di Sumatera Utara dengan metode kuantitatif melalui empat variabel pengukuran DeLone dan McLean. Pada penelitian tersebut diperoleh simpulan jika implementasi SAKTI telah berjalan dengan sukses. At-tamimi dan Siregar (2021) meneliti tentang kesuksesan implementasi SAKTI *web full module* pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menggunakan metode kuantitatif dengan model DeLone dan McLean. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa persepsi pengguna berpengaruh positif terhadap implementasi SAKTI.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis akan mengevaluasi implementasi SAKTI *web full module* atas pengelolaan keuangan di BPKP menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan melalui kuesioner kepada pengguna SAKTI di BPKP menggunakan enam variabel pengukuran dalam Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean. Model tersebut dianggap yang paling relevan dengan topik dan mendekati tujuan penulis pada penelitian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, serta diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menghasilkan

simpulan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis telah merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas di dalam KTTA ini berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai berikut.

1. Bagaimana evaluasi kualitas sistem atas implementasi SAKTI pada BPKP?
2. Bagaimana evaluasi kualitas informasi atas implementasi SAKTI pada BPKP?
3. Bagaimana evaluasi kualitas layanan atas implementasi SAKTI pada BPKP?
4. Bagaimana evaluasi penggunaan atau minat penggunaan atas implementasi SAKTI pada BPKP?
5. Bagaimana evaluasi kepuasan pengguna atas implementasi SAKTI pada BPKP?
6. Bagaimana evaluasi manfaat bersih atas implementasi SAKTI pada BPKP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi kualitas sistem atas implementasi SAKTI pada BPKP.
2. Mengevaluasi kualitas informasi atas implementasi SAKTI pada BPKP.
3. Mengevaluasi kualitas layanan atas implementasi SAKTI pada BPKP.
4. Mengevaluasi penggunaan atau minat penggunaan atas implementasi SAKTI pada BPKP.

5. Mengevaluasi kepuasan pengguna atas implementasi SAKTI pada BPKP.
6. Mengevaluasi manfaat bersih atas implementasi SAKTI pada BPKP.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan agar pembahasan penelitian ini tidak mengarah ke aspek-aspek yang tidak relevan. Batasan-batasan yang telah ditentukan penulis yaitu sebagai berikut.

1. Fokus penelitian adalah mengevaluasi implementasi SAKTI atas pengelolaan keuangan di BPKP.
2. Lokus penelitian adalah 33 Satker di Lingkungan BPKP.
3. Periode yang dievaluasi adalah tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun pertama *roll out* SAKTI.
4. Responden penelitian adalah pengguna SAKTI pada BPKP.
5. Data primer penelitian diperoleh melalui kuesioner secara *online* pada 33 Satker di Lingkungan BPKP dan wawancara khusus pada Satker Kantor Pusat BPKP.
6. Data sekunder penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam memahami dan memperluas pengetahuan tentang perkembangan SAKTI untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut ditinjau dari aspek prosedur historis yang

dimulai dari *piloting* tahap I hingga dilaksanakan *roll out* pada tahun anggaran 2022.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ladang bagi penulis untuk menerapkan hasil belajar selama berkuliah di PKN STAN terkait akuntansi pemerintah pada umumnya dan SAKTI pada khususnya. Selain itu juga memberikan gambaran proses bisnis atas tahun pertama *roll out* SAKTI di BPKP serta mengetahui secara langsung hasil evaluasinya.

b. Bagi BPKP selaku Pengguna

Hasil evaluasi yang dihimpun berdasarkan *feedback* yang diberikan diharapkan dapat membantu dalam mengetahui keberhasilan dan hambatan berikut tantangan yang dihadapi oleh pengguna SAKTI pada tahun pertama *roll out* di BPKP.

c. Bagi Kemenkeu selaku Penyelenggara Sistem

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi Kemenkeu guna memberikan masukan tentang hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau dikembangkan dalam mendukung penyempurnaan SAKTI untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan untuk melengkapi pokok-pokok yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian terkait

sebelumnya. Atas hal tersebut, penelitian ini bersama dengan penelitian-penelitian terkait sebelumnya diharapkan dapat menjadi gambaran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kualitas sistem informasi dan/atau aplikasi keuangan pemerintah khususnya SAKTI dalam kaitannya dengan persepsi pengguna.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari topik KTTA yang diambil penulis. Gambaran umum tersebut disajikan dalam enam subbab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menjelaskan teori-teori untuk mendukung penelitian pada KTTA ini dengan didasarkan pada peraturan-peraturan terkait yang relevan. Secara garis besar, penulis akan mengungkapkan *overview* SAPP berikut alur bisnis dan pihak-pihak yang terlibat, menerangkan pengertian dari SAKTI termasuk *piloting* dan *roll out*, menjabarkan enam variabel pengukuran dalam Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean, hingga menguraikan dan membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian pada KTTA ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian pada KTTA ini. Penjelasan berikutnya menguraikan gambaran umum mengenai organisasi lokus penelitian meliputi struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi, serta lingkup wilayah kerja. Poin pada bab ini adalah penjabaran tentang pembahasan atas evaluasi implementasi SAKTI pada BPKP menggunakan enam variabel pengukuran dalam Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean sampai mendapatkan hasil pembahasan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan atas hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai evaluasi implementasi SAKTI pada BPKP. Melalui bab ini, penulis akan memberikan saran bagi pihak-pihak terkait seperti BPKP selaku Pengguna dan Kemenkeu selaku Penyelenggara SAKTI apabila hasil pembahasan menunjukkan adanya hal-hal yang memerlukan perbaikan dan/atau pengembangan dalam rangka penyempurnaan SAKTI untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.